

**Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Jombang****Robby Firmansyah Aji¹, Rachmawati Novaria²**Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ^{1,2}Email : sayarobby5@gmail.com ¹, nova@untag-sby.ac.id ²**INFO ARTIKEL****ABSTRAK****Kata Kunci:** *Kebijakan Publik, Implementasi, Stunting, Penurunan, dan Pencegahan.*

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh kembang yang mengakibatkan anak lebih pendek dari seusianya akibat pemenuhan gizi yang tidak sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan yang mempengaruhi fisik serta fungsional dari tubuh anak. Stunting berpengaruh terhadap generasi masa depan Indonesia terutama pada usia emas kemerdekaan tahun 2045. Pemerintah Daerah kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupten Jombang. Balita stunting pada awal 2024 di Kabupaten Jombang berjumlah 3639 balita dengan prevalensi stunting 5,85% yang mana telah mencapai target nasional yakni tidak melebihi 14%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang serta faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Menggunakan analisis berdasarkan teori Soren C. Winter (2004) dimana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrat level bawah, serta perilaku kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah kabupaten Jombang telah mengimplementasikan kebijakan dengan cukup baik ditandai dengan penurunan kasus stunting dari 5.509 kasus pada 2022 menjadi 3.428 per September 2024. Kendati demikian masih terdapat indikator percepatan penurunan stunting yang belum memenuhi target terutama yang berkaitan dengan perilaku birokrat level bawah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hambatan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting yang muncul dapat dijadikan bahan perbaikan kedepannya. Sejalan dengan kesimpulan, maka disarankan; untuk mengoptimalkan kinerja para pelaku kebijakan serta meningkatkan sumber daya manusia para implementator tingkat bawah. Melakukan kolaborasi dengan sektor publik maupun sektor swasta sehingga dapat mengoptimalkan tindakan preventif pencegahan stunting.

Keywords: Public Policy, Implementation, Stunting, Reduction, and Prevention.

ABSTRACT

Stunting is a condition of failure to grow and develop that results in children being shorter than their age due to improper nutritional fulfillment in the first 1000 days of life which affects the physical and functional of the child's body. Stunting affects Indonesia's future generations, especially in the golden age of independence in 2045. The Regional Government of Jombang Regency issued Jombang Regent Regulation number 4 of 2022 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Reduction in Jombang Regency. Stunted toddlers in early 2024 in Jombang Regency totaled 3639 children under five with a stunting prevalence of 5.85%, which has reached the national target of not exceeding 14%. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of integrated stunting reduction acceleration policies in Jombang Regency and the factors that are inhibiting it. The research uses a qualitative method with data collection carried out by observation, interview, and document study techniques. Using analysis based on the theory of Soren C. Winter (2004) where the success of implementation is influenced by the behavior of relationships between organizations, the behavior of lower-level bureaucrats, and the behavior of target groups. The results of the study show that the Jombang district government has implemented policies quite well, marked by a decrease in stunting cases from 5,509 cases in 2022 to 3,428 as of September 2024. However, there are still indicators of acceleration in stunting reduction that have not met the target, especially related to the behavior of lower-level bureaucrats that need to be improved and improved. Obstacles in the implementation of stunting reduction policies that arise can be used as material for improvement in the future. In line with the conclusion, it is recommended; to optimize the performance of policy actors and improve human resources of lower-level implementers. Collaborate with the public and private sectors so that they can optimize preventive measures to prevent stunting.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh kembang yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik, yang mengakibatkan anak lebih pendek dari seusianya dan mempengaruhi fisik serta fungsional dari tubuh anak. Stunting terjadi akibat pemenuhan gizi yang tidak sesuai pada masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK) atau sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun (Kemenkes RI, 2018). Menurut WHO (2013) stunting dapat mempengaruhi perkembangan motorik, kognitif, pribadi, sosial, dan bahasa yang merupakan konsekuensi jangka pendek bagi perkembangan balita sehingga jika tidak diatasi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka Panjang

akan berakibat buruk dengan timbulnya keterbelakangan mental, kurangnya kemampuan belajar, resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas (Iswati, Arief Darmawan, dan Rachmawati Novaria, 2024). Faktor penyebab terjadinya stunting meliputi kemiskinan, penyakit menular, gizi, dan ketidak amanan masyarakat. Layanan akses Kesehatan juga mempengaruhi tingkat stunting pada suatu daerah yang diakibatkan ketidak merataan akses kesehatan yang dapat diterima antar satu daerah dengan daerah lainnya sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan yang mempengaruhi (Mastuti, dan Indahwati, 2021).

Angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 masih berada pada posisi 21,6% dari target 14% yang diharapkan oleh presiden Jokowi sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pasal 5 ayat (1) yaitu: “dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada 2024. Untuk mencapai target tersebut ditetapkan lima pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting yang salah satu poin intinya adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan serta peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan stunting salah satunya dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Jombang. Kasus stunting yang dilaporkan di Kabupaten jombang pada 2024 berjumlah 3.639 balita dengan prevalensi stunting 5,85%. komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung kebijakan Presiden Jokowi berkenaan dengan stunting ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jombang nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang. Ditambah lagi sejak 2023 Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Pejabat Bupati dimana dalam penilaian kinerja setiap 3 bulanan terdapat indikator penanganan stunting.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomor 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwa kegiatan percepatan penurunan stunting terintegrasi dilakukan dengan 5 pilar menyakup komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat; kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal; konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten; mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/ keamanan pangan; dan pemantauan serta evaluasi program. Selain pada 5 pilar tersebut kegiatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dengan sasaran; remaja putri; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak usia 0-59 bulan. Serta intervensi gizi sensitive yang dilakukan pada sasaran masyarakat umum.

Hasil observasi awal terdapat penurunan jumlah balita stunting pada 2024 berjumlah 3.639 dari tahun 2023 yang masih di angka 4.441. Penurunan jumlah balita stunting ditenggarai sebagai dampak Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2022. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan penelitian berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang serta mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan. Penelitian dilakukan dalam lingkup Kabupaten Jombang dengan lokus utama pada Dinas Kesehatan kabupaten Jombang. penelitian didasarkan pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Soren C. Winter (2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Masyuri dan M Zainudin (2008:13) berarti “penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris”. Pada penelitian kualitatif mengedepankan pada kondisi realitas sosial dilapangan, makna budaya serta berfokus pada proses yang interaktif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang. Data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi untuk menemukan gambar, catatan, atau foto. Hasil data yang telah dikumpulkan dianalisis menurut sugiyono (2018:485) menjadi tiga tahapan meliputi; reduksi data; penyajian data; serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengedepankan deskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis pada fakta tertentu. Sehingga penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan berkenaan dengan bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang sekaligus menemukan faktor penghambatnya.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting yang harus diperhatikan guna menemukan data dilapangan pada saat penelitian, agar terjadi kesesuaian tema yang diangkat dan berjalan sesuai dengan jalur yang direncanakan. Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas sehingga pembahasan bisa terfokus dan hasilnya lebih detail. Fokus pada penelitian ini berkenaan dengan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Jombang nomor 4 tahun 2022 dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang dengan analisis menggunakan teori Soren C. Winter (2004) meliputi perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrat level bawah/implementator dan perilaku kelompok sasaran.

Lokus utama penelitian dilaksanakan pada Dinas Kesehatan kabupaten Jombang. Alasan dari dipilihnya lokus tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah organisasi yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesehatan serta memprakasai lahirnya kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Jombang dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2022.

Untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian diperlukan berbagai macam sumber data yang mendukung suatu penelitian. Sumber data diartikan sebagai asal data diperoleh dan penentuannya menjadi bagian krusial dalam penyusunan penelitian karena data yang diperoleh mempengaruhi hasil dari penelitian. Pada penelitian kualitatif sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu; data primer yang perolehannya dari informan kunci yang didapatkan melalui wawancara dengan observasi langsung dari pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten jombang; dan data sekunder yang perolehannya melalui hasil data yang telah diolah lebih lanjut dan telah tersaji dalam bentuk tabel atau diagram yang biasanya diperoleh dari laporan instansi pemerintah, hasil penimbangan pada posyandu, publikasi ilmiah, maupun pada website.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data yang mana menurut Moleong (2013:330) mendefinisikan triangulasi sebagai teknik dalam penentuan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu yang digunakan sebagai pembanding dan mengecek data tersebut. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan cara mengecek sebuah informasi atau pernyataan dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya secara berulang hingga mendapatkan data dan informasi yang valid. selanjutnya uji keabsahan

data secara triangulasi dijalankan melalui tahapan; membandingkan data hasil observasi dengan data hasil *in dept interview*; membandingkan data dari studi dokumen dan literatur dengan hasil wawancara; dan membandingkan hasil *in dept interview* dari beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang mempedomani Peraturan Bupati Jombang nomor 4 tahun 2022 berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan model implementasi kebijakan Soren c. Winter, maka ada 3 variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Winter (2004) adalah perilaku hubungan antar organisasi. Perilaku hubungan antar organisasi yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi harus saling berhubungan dengan baik. Tidak boleh ada organisasi yang merasa lebih baik dari organisasi lainnya. Hubungan satu dengan yang lainnya adalah hubungan saling melengkapi sesuai dengan tupoksi organisasi dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi. Perilaku hubungan antar organisasi meliputi dua aspek yakni komitmen dan koordinasi.

Pada aspek komitmen, adanya dokumen pernyataan komitmen yang ditanda tangani oleh Bupati menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam penanganan stunting di Kabupaten Jombang. didukung dengan adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan stunting dalam APBD Daerah serta adanya inovasi pembuatan aplikasi JOSS untuk mengontrol jumlah stunting pada tiap tiap desa dan kecamatan di Kabupaten Jombang menjadi bukti komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten Jombang untuk menangani permasalahan stunting.

Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting 2024

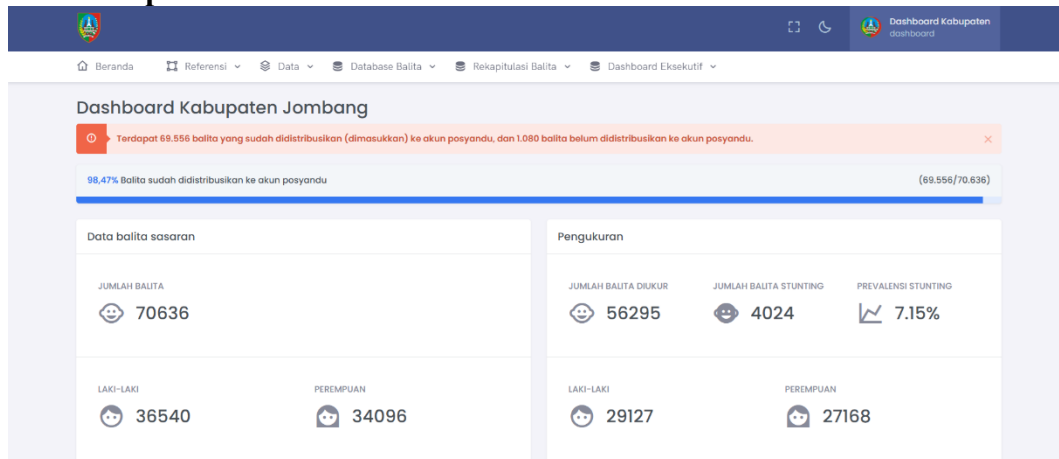
NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH INTERVENSI (SPESIFIK, SENSITIF, DAN KOORDINASI)	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH INTERVENSI SENSITIF	ANGGARAN INTERVENSI SENSITIF (Rp.)	JUMLAH INTERVENSI SPESIFIK	ANGGARAN INTERVENSI SPESIFIK (Rp.)	JUMLAH INTERVENSI KOORDINATIF	ANGGARAN INTERVENSI KOORDINASI (Rp.)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	15.200.000					1	15.200.000
2	Dinas Kesehatan	12	70.386.221.076	7	57.627.321.200	5	12.758.899.876		
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	1.908.393.850	1	1.458.649.100	2	449.744.750		
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	14.000.000	1	14.000.000				
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	81.570.192	1	81.570.192				
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	1.740.988.500	1	199.988.500	1	1.541.000.000		
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	10.123.714.600	16	10.123.714.600				
8	Dinas Pertanian	2	780.000.000	2	780.000.000				
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	3	5.241.543.249	3	5.241.543.249				
10	Dinas Sosial	2	2.001.309.185,00	2	2.001.309.185,00				
11	Puskemas	3	13.397.975.900	1	514.387.000	2	12.883.588.900		
12	RSUD JOMBANG	2	2.692.925.610			2	2.692.925.610		
13	RSUD PLOSO	1	141.581.656			1	141.581.656		
	JUMLAH	49	108.525.423.818	35	78.042.483.026	13	30.467.740.792	1	15.200.000
					71,91%		28,07%		0,01%

Sumber: Dokumen Evaluasi Pj Bupati Jombang

Pada aspek koordinasi, Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi diperoleh hasil bahwa koordinasi antar organisasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk mulai dari pelaksanaan posyandu balita, penyuluhan stunting, penghimpunan data dan

laporan rutin, hingga rapat evaluasi. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan unsur pentahelix meliputi akademisi, komunitas, pengusaha, dan media yang terlibat dalam inisiatif pendanaan penurunan stunting di Kabupaten Jombang. Koordinasi yang baik dapat berjalan baik jika tidak ada yang bersikap acuh terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar organisasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang sudah cukup baik.

Data Pada Aplikasi Joss



Sumber: joss.jombangkab.go.id

Perilaku Birokrasi Level bawah

Selain perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Posisi birokrat level bawah/ implementator berhubungan erat dengan berhasil tidaknya suatu kebijakan publik. Pada level ini implementator bersentuhan langsung dengan subyek dan fokus kebijakan, sehingga sebegus apapun kebijakan yang dibuat ketika pada level ini bermasalah maka akan sia-sia hasilnya. pada indikator ini meliputi etos kerja, kontrol organisasi, dan profesionalisme

Pada aspek etos kerja yang merupakan tekad yang keras untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perwujudan pengimplementasian suatu kebijakan publik. Etos kerja berguna untuk memacu kerja para implementator dalam pencapaian target yang telah dirumuskan. Para implementator dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan cakupan data yang terkumpul dari level bawah yang telah dilaporkan dan terinput melalui aplikasi joss.jombangkab.go.id. selain itu juga ditunjukkan dengan ketercapaian pada indikator kinerja pada percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Rekapitulasi Data Balita Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Jml Balita Aktif	Jml Balita Terdata Posyandu	% Balita Terdata Posyandu	Jml Balita Diukur	% Balita Diukur	Jml Balita Stunting	% Balita Stunting
1	Bandarkedungmulyo	2.961	2.961	100.00%	1.654	55.86%	50	3.02%
2	Bareng	3.398	3.398	100.00%	1.887	55.53%	134	7.10%
3	Divek	5.948	5.948	100.00%	3.779	63.53%	214	5.66%
4	Gudo	2.730	2.640	96.70%	989	36.23%	85	8.59%
5	Jogoroto	4.204	4.204	100.00%	1.258	29.92%	73	5.60%
6	Jombang	6.288	6.156	97.90%	3.790	60.27%	185	4.88%
7	Kabuh	2.256	2.121	94.02%	809	35.86%	73	9.02%
8	Kesamben	3.513	3.474	98.89%	1.195	34.02%	55	4.60%
9	Kudu	1.641	1.641	100.00%	1.192	72.64%	76	6.38%
10	Megaluh	2.112	2.112	100.00%	2.084	98.67%	108	5.18%
11	Mojoagung	4.800	4.797	99.94%	1.338	27.88%	109	8.15%
12	Mojowarno	5.453	4.820	88.39%	1.126	20.65%	97	8.61%
13	Ngoro	4.411	4.406	99.89%	3.947	89.48%	203	5.14%
14	Nigusikan	1.183	1.183	100.00%	803	67.88%	24	2.99%
15	Perak	3.185	3.185	100.00%	2.662	83.58%	305	11.46%
16	Peterongan	3.538	3.538	100.00%	2.450	69.25%	115	4.69%
17	Plandan	1.865	1.865	100.00%	1.263	67.72%	175	13.86%
18	Ploso	2.059	2.052	99.66%	1.469	71.35%	124	8.44%
19	Sumobito	4.369	4.369	100.00%	1.070	24.49%	127	11.87%
20	Tembelang	2.975	2.947	99.06%	2.414	81.14%	177	7.33%
21	Wonosalam	1.767	1.767	100.00%	964	54.56%	85	8.82%
	Total:	70.666	69.684	98,48%	38.143	53,98%	2.594	6,80%

Sumber: joss.jombangkab.go.id

Etos kerja dari para implementator dipengaruhi oleh kontrol organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya implementasi pada level bawah sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan pada level bawah. Berkaitan dengan kesesuaian hasil kerja dengan rencana yang termuat dalam dokumen percepatan penurunan stunting serta turunannya. Pada indikator capaian data pelayanan intervensi sensitif dari sembilan sub indikator yang ada terdapat enam sub indikator yang telah tercapai. Kontrol yang dilakukan oleh pihak terkait dilaksanakan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kontrol pada puskesmas, puskesmas melakukan kontrol pada wilayah cakupannya. Sehingga dinyatakan bahwa kontrol organisasi yang dilakukan para pemangku kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan percepatan penurunan stunting dilapangan juga terlaksana dengan baik.

Profesionalisme dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi berhubungan dengan kesesuaian hasil kerja dengan tanggungjawab masing-masing serta berpedoman pada aturan yang ada. Pada sub indikator ini kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian proses percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang. nilai profesionalisme pada implementator kebijakan publik ditunjukkan dalam ketercapaian pada indikator percepatan penurunan stunting. dari total 20 indikator yang ada sampai dengan semester 1 2024 terdapat sebelas indikator yang telah memenuhi target capaian. Terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi, sehingga pada indikator profesionalismen birokrat level bawah dinyatakan belum seperti yang diharapkan meskipun narasumber yang diwawancarai sudah menyatakan bahwa dirinya profesional.

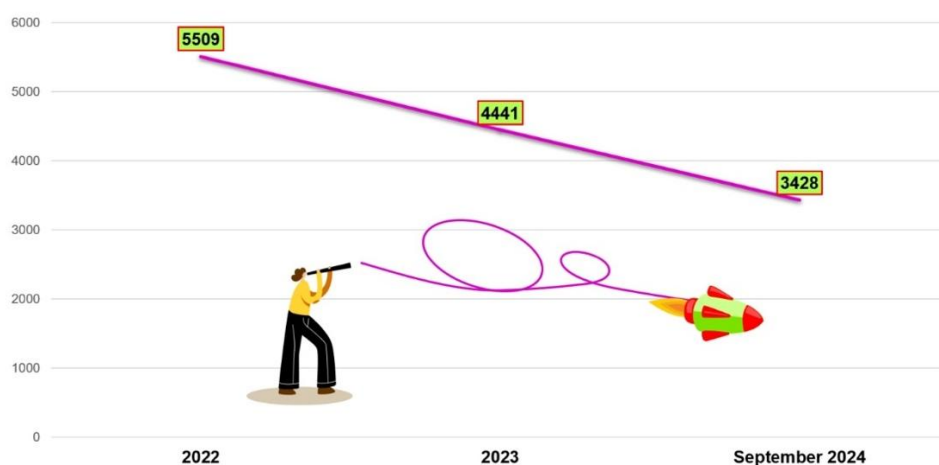
Perilaku Kelompok Sasaran

Faktor terakhir menurut winter (2004) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam percepatan

penurunan stunting terintegrasi meliputi; remaja putri; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak usia 0-59 bulan. Pada faktor ini menimbulkan dua indikator pembentuk yakni respon positif dan respon negatif.

Respon positif digunakan sebagai indikator penilaian baiknya suatu kebijakan. respon positif tidak hanya ditunjukkan pada pernyataan suka kelompok sasaran pada kebijakan melainkan juga pada partisipasi dan keikutsertaan kelompok sasaran pada proses pengimplementasian kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa respon positif diberikan oleh kelompok sasaran pada proses pengimplementasian kebijakan penurunan stunting terintegrasi. Respon positif dari kelompok sasaran menjadi bekal untuk mempertahankan kebijakan tersebut lebih-lebih meningkatkan kualitas kebijakan publik tersebut.

Jumlah Kasus Stunting 3 Tahun



Sumber: diolah peneliti, 2024

Respon negatif menjadi antonim dari indikator diatas, respon ini diberikan oleh kelompok sasaran ketika merasa tidak puas atas suatu kebijakan. adanya respon negative menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk perbaikan kedepannya. Kelompok sasaran kadang tidak berani mengungkapkan secara gamblam atas ketidaksukaannya terhadap kebijakan publik. dalam kasus ini juga tidak ada wawancara dengan narasumber yang memberikan respon negatif. Namun terdapat pesan tersirat yang disampaikan oleh kader posyandu yang mengeluhkan hanya mendapatkan honor yang sedikit sebagaimana dalam wawancara diatas.

Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku kelompok sasaran banyak yang memberikan respon positif terhadap kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi, sedangkan respon negatif samar terdengar dalam wawancara peneliti dengan narasumber.

Faktor Penghambat

Kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang implementasinya diharapkan bisa terlaksana tanpa hambatan apapun. Namun kondisi dilapangan memberikan hasil berbeda, membuat apa yang diharapkan dalam kebijakan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Terdapat hambatan dan halangan dalam proses implementasi kebijakan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten

Jombang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa indikator kinerja pada percepatan penurunan stunting terintegrasi yang ketercapainya belum sesuai target. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti organisasi, implementator, dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dilapangan, adapun faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting antara lain:

1. Kelompok sasaran yang tidak ada keinginan untuk ke Posyandu dan susah untuk ditemui;
2. Terdapat beberapa aplikasi penginputan data balita menjadikan pekerjaan kader menjadi double;
3. Perbedaan hasil hitung jumlah balita stunting pada aplikasi Si Gizi dan Joss;
4. Kendala jaringan pada beberapa lokasi menyebabkan keterlambatan penginputan data;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepesertaan KB pasca persalinan;
6. Kurangnya kepedulian remaja putri dalam mengkonsumsi Tablet Tambah Darah;
7. Terdapat Pasangan Usia Subur tidak melaksanakan pemeriksaan Kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
8. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi anak;
9. Ketidapahaman ibu berkaitan dengan stunting.

Hambatan yang muncul diatas sejalan dengan ketidak tercapainya indikator kinerja percepatan penurunan stunting, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan agar hambatan yang timbul dapat teratasi dan indikator kinerja percepatan penurunan stunting dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Jombang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Jombang berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter (2004) menunjukkan bahwa:
 - a. indikator perilaku hubungan antar organisasi yang mencakup komitmen dan koordinasi sudah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen para pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya serta jalinan hubungan koordinasi yang baik antar para pelaku kebijakan.
 - b. Dalam indikator perilaku birokrat level yang mencakup etos kerja, control organisasi dan profesionalisme. setiap unsur telah paham akan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Walaupun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator percepatan penurunan stunting yang belum tercapai.
 - c. Indikator perilaku kelompok sasaran yang berkaitan dengan respon positif dan respon negatif dari kelompok sasaran. Secara umum menunjukkan respon positif, mereka telah memahami isi kebijakan yang telah dilakukan. Walaupun demikian setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah juga tidak pernah terlepas dari respon negatif meskipun tidak terlalu signifikan sehingga perlu diperhatikan.

- d. Pemerintah kabupaten Jombang telah mengimplementasikan kebijakan dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan turunan jumlah kasus stunting 3 tahun terakhir dari 5509 kasus di tahun 2022 hingga 3428 kasus per September 2024.
2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penurunan percepatan stunting terintegrasi di Kabupaten Jombang, sebagai berikut:
 - a. Kelompok sasaran yang tidak ada keinginan untuk ke Posyandu dan susah untuk ditemui;
 - b. Terdapat beberapa aplikasi penginputan data balita menjadikan pekerjaan kader menjadi double;
 - c. Perbedaan hasil hitung jumlah balita stunting pada aplikasi Si Gizi dan Joss;
 - d. Kendala jaringan pada beberapa lokasi menyebabkan keterlambatan penginputan data;
 - e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepesertaan KB pasca persalinan;
 - f. Kurangnya kepedulian remaja putri dalam mengkonsumsi Tablet Tambah Darah;
 - g. Terdapat Pasangan Usia Subur tidak melaksanakan pemeriksaan Kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - h. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi anak;
Ketidakhahaman ibu berkaitan dengan stunting.

Adapun beberapa rekomendasi saran yang peneliti ajukan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan kinerja para pelaku kebijakan dalam hal ini perangkat daerah terkait dalam mencapai tujuan dari kebijakan. Selain itu didukung dengan alokasi anggaran yang optimal.
2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia para implementator tingkat bawah dalam mengupdate perkembangan stunting baik dalam hal regulasi maupun informasi lainnya.
3. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik sektor publik maupun sektor swasta yang dapat membantu memberikan solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.
4. Mengoptimalkan tindakan preventif baik dalam bentuk sosialisasi maupun pendampingan terhadap kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Publikasi

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alviyanti, Virda Devy Dwi, dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kelurahan Kedung Baruk Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3 (11).
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keem)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Islamy, M. I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara.

- Iswati, Dkk (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Melalui Program Kelas Pengantin Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14 (1), 79-84.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Kemendes. Kementerian Kesehatan RI.* <file:///C:/Users/Andi/Downloads/Buletin-Stunting-2018.pdf>.
- Koontz, Harold dan Cyril O'Donnel. 1980. *Management. Edition VII Tokyo*: McGraw Hill, Kogakusha.Ltd.
- Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Mastuti, N. L. P. H., dan Indahwati, L. 2021. Pengaruh Stunting Terhadap Perkembangan Motorik Halus, Motorik Kasar, Bahasa Dan Personal Sosial Pada Anak Balita Usia 2-5 Tahun Di Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Journal of Issues In Midwifery*, 5(3), 111–120.
- Masyhuri dan M.Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, J Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neuman. 2006. *Social Research Methods: qualitative and quantitative approach-6th edition*. United States of America: Pearson.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisa Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik (Edisi Keen)*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Nurdin, ismail. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: IPDN.
- Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy* 6, 21–48.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metod penelitian bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Untuk Ilmu Sosial Ekonomi (Edisi Revi)*. Bandung: AlfabetaDye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy (4th Edition)*. Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall Inc, Ltd
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahab, S. (1994). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winter, Soren C, 2004. *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. *Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.
- Winter, S.C. (2012) 'Implementation Perspectives: Status and Reconsideration', in *The SAGE Handbook of Public Administration*, pp. 265–278. Available at: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198825104.013.11>.
- WHO. (2022). Children under 5 years who are stunted (moderate and severe). *Rho.Emrowho.Int.* <https://rho.emro.who.int/Metadata/children-under-5-years-who-are-stunted-moderate-and-severe>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)